

# BAB I

## Pendahuluan

### 1.1 Latarbelakang

Lebih dari dua dasawarsa terakhir di berbagai belahan dunia telah bermunculan *Non-Governmental Organizations* (NGOs) dengan keanekaragaman, kredibilitas, dan kreatifitas yang berhubungan langsung dengan masyarakat akar rumput (*grassroot*) dan diharapkan mampu membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang sulit dilakukan ataupun luput dari pengamatan.<sup>1</sup>

Sebagai agen *civil society*, NGO difokuskan dalam percepatan proses pembangunan, terutama di Negara Dunia Ketiga.<sup>2</sup> Dalam perkembangannya, perhatian NGO baik di Negara utara maupun selatan juga mengalami perkembangan. NGO pada awalnya hanya berfokus pada hal-hal yang bersifat pembangunan ekonomi (kesejahteraan) masyarakat, tapi saat ini lebih kepada hal-hal yang terfokus seperti masalah lingkungan hidup, kesetaraan *gender*, perlindungan anak-anak, mitigasi bencana, dan hal-hal lain yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Di Indonesia, NGO dianggap sebagai satu bentuk organisasi gerakan sosial yang secara umum dikenal dengan istilah Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Perkembangan LSM yang pesat sebagai gerakan sosial terorganisir (*organized social movement*)

---

<sup>1</sup> John Clark, *Democratizing Development: The Role of Voluntary Organizations*, ed. Godril Diby Yuwono. Tiara Wacana. Yogyakarta. 1995 hlm3

<sup>2</sup> Ibid. hlm.9

sejak tahun 1970an sangatlah mengesankan jika ditinjau dari segi jumlah. Jika di akhir tahun 1960an dan awal tahun 1970an hanya sedikit sekali gerakan sosial dan kelompok non-pemerintah yang secara aktif memiliki kepedulian dan kemampuan untuk menangani masalah-masalah pembangunan, kini keadaan tersebut telah jauh berbeda, apalagi pasca reformasi 1998, pertumbuhan LSM di Indonesia meningkat drastis jumlahnya. Dan sekarang telah berkembang menjadi sekitar 3000 LSM yang terdaftar secara resmi tersebar di seluruh Indonesia.<sup>3</sup>

Salah satu NGO lingkungan di Indonesia yang fokus pada konservasi hutan Sumatra adalah NGO Komunitas Konservasi Indonesia Warung Konservasi Indonesia (KKI Warsi).<sup>4</sup> NGO yang berkantor pusat di Kota Jambi ini telah melakukan banyak kegiatan yang berusaha menjaga kelestarian dan kelangsungan kehidupan di hutan Indonesia, terutama di Pulau Sumatra. KKI Warsi didirikan pertama kali sebagai lembaga jaringan dengan nama Yayasan Warung Informasi Konservasi (Warsi) pada bulan Januari 1992. Pendiariannya diprakarsai oleh dua belas LSM dari empat provinsi di Sumatera bagian selatan (Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jambi, dan Bengkulu) yang peduli pada masalah-masalah konservasi Sumber Daya Alam (SDA) dan pengembangan masyarakat (*community development*)<sup>5</sup>. Pada bulan Juli 2002 Yayasan Warsi berubah menjadi perkumpulan dengan nama

---

<sup>3</sup> Mansour Fakhri. Masyarakat sipil untuk transformasi sosial: pergolakan ideologi LSM Indonesia, Yogyakarta, INSISTpress, 2010, hlm.4

<sup>4</sup> Sebuah NGO yang fokus kegiatannya dalam hal lingkungan hidup, terutama masalah kehutanan. NGO Warsi saat ini memiliki kantor pusat di Jambi, dan telah memiliki anggota tetap lebih kurang 84 orang.

<sup>5</sup> Profile Komunitas Konservasi Indonesia WARSI.  
[http://www.warsi.or.id/about\\_us/Profile\\_Ind.php](http://www.warsi.or.id/about_us/Profile_Ind.php) diakses pada 16 Oktober 2013

Komunitas Konservasi Indonesia Warung Konservasi Indonesia (KKI Warsi). KKI Warsi sendiri sejak awal berdirinya telah menjalin kerjasama dengan pihak domestik maupun internasional.<sup>6</sup>

Dalam melaksanakan programnya, sebuah NGO dibantu oleh donor, hal ini disebabkan NGO memiliki keterbatasan dana dan NGO bukanlah organisasi yang berorientasi keuntungan (*profit oriented*). Dimana dalam memperoleh dana tersebut bisa dari pemerintah nasional, kerjasama antar NGO maupun internasional (INGO), baik berupa kerjasama maupun bantuan langsung. NGO juga bisa mengakses dana dari institusi-institusi internasional seperti Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), Bank Dunia, dan *International Monetary Fund* (IMF) dan lembaga bantuan resmi pemerintah seperti: *United States Agency for International Development* (USAID), *Norwegian Agency for Development Cooperation* (NORAD), *The German Organisation for Technical Cooperation* (GTZ), *Australian Agency for International Development* (AUSAID), *Department for International Development* (DFID), *Asian Development Bank* (ADB), dan dari sesama NGO baik di tingkat lokal maupun internasional.<sup>7</sup>

Di tingkat nasional KKI Warsi pernah melakukan kerjasama dengan Kementerian kehutanan, Badan Pengawas Daerah Aliran Sungai (BAPPEDAS), dan beberapa instansi pemerintah lainnya serta NGO lokal nasional. Sedangkan ditingkat

---

<sup>6</sup> Profile Komunitas Konservasi Indonesia WARSI.

[http://www.warsi.or.id/about\\_us/Profile\\_Ind.php](http://www.warsi.or.id/about_us/Profile_Ind.php) diakses pada 16 Oktober 2013

<sup>7</sup> Mansour Fakih. Masyarakat sipil untuk transformasi sosial: pergolakan ideologi LSM Indonesia hlm5

internasional, KKI Warsi telah banyak memiliki *partner* seperti *World Bank*, *Private Agency Colaborating Together (PACT)-United States Aids for International Development (USAID)*, *Japan Grant Facility (JGF)*, *World Wild Fund (WWF)*, *Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD)*, *International Union Conservation of Nature (IUCN)*, *Rain Forest Norway (RFN)*, dan lembaga internasional lainnya,<sup>8</sup>

KKI Warsi memiliki donor terbesar yaitu *International Union Conservation of Nature (IUCN)* dalam program *Increasing Community Welfare Throught Participative Forest Management At Batanghari Basin*<sup>9</sup> Dimana program tersebut fokus pada hak masyarakat akan hutan, mata pencaharian, dan advokasi perkebunan. Program ini telah dilaksanakan di lima kabupaten, tiga di Provinsi Jambi (Kabupaten Bungo, Kabupaten Batanghari, dan Kabupaten Sorolangun), dan dua di Provinsi Sumatra Barat (Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan). Dan pada saat ini fokus program berada di Solok Selatan karena program yang di Jambi bisa dikatakan telah sukses.<sup>10</sup>

IUCN merupakan NGO internasional yang menyalurkan dana bagi NGO di Negara selatan yang fokus pada program konservasi.<sup>11</sup> IUCN berkantor pusat di Negara Belanda, akan tetapi IUCN memiliki perwakilan inti di tiga negara, yaitunya

---

<sup>8</sup> Mansour Fakhri. Masyarakat sipil untuk transformasi sosial: pergolakan ideologi LSM Indonesia hlm5

<sup>9</sup> Wawancara dengan koordinator program KKI Warsi-IUCN, Raynal Daus, serta Riche Deswita sebagai koordinator program KKI Warsi-RFN, dan Kasra Nofri sebagai staff lapangan untuk cabang Sumatra Barat

<sup>10</sup> *ibid*

<sup>11</sup> IUCN. *About IUCN*. <http://iucn.org/about/> diakses pada 04 Januari 2014

Amerika Serikat, Belanda, dan Swiss. Sedangkan sumber dana IUCN sendiri berasal dari sumbangan warga negara yang peduli pada lingkungan, serta potongan gaji pegawai pemerintah setiap bulannya.<sup>12</sup>

Kecurigaan akan muncul terhadap NGO yang memiliki donor apalagi donor asing, dalam arti berada dibawah dominasi kepentingan para donor. Hal ini kemudian diperkuat dengan banyaknya ditemui baik di negara maju maupun negara berkembang NGO yang menjadi perpanjangan tangan donor dalam pencapaian tujuannya. Situasi tersebut tentunya membutuhkan klarifikasi karena NGO harus independen dalam menentukan tindakan tanpa campur tangan pihak ekstern termasuk donor.<sup>13</sup> Sehingga dalam kondisi politik yang demikian itu patut diragukan akan independensi sebuah NGO, bahkan saat ini masyarakat berasumsi bahwa tidak ada NGO yang benar-benar bebas dan otonom dari intervensi kepentingan agen-agen di luar NGO yang menjadi penyandang dana bagi kelangsungan aktivitas dan usaha NGO bersangkutan.

Dalam kerjasama NGO dengan donor ada tiga bentuk pola hubungan, yaitu pola hubungan dependensi, interdependensi, dan independensi<sup>14</sup>. Pola tersebut

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Nofri selaku staff KKI Warsi di Solok Selatan pada september 2012

<sup>13</sup> Revisond Baswir. Problematika LSM di Indonesia “Transparansi dan Akuntabilitas LSM”. Disarikan dari presentasinya pada acara Diskusi Publik “Menyoal Transparansi dan Akuntabilitas LSM” di Jakarta, Februari 2003

<sup>14</sup> FordFoundation. Independensi. Independensi adalah otonom dan bebas dari pengaruh dan kepentingan-kepentingan pemerintah, partai politik, donor/lembaga penyandang dana, sektor bisnis dan siapapun yang dapat menghilangkan independensi organisasi dalam bertindak bagi kepentingan umum.

<http://accountability.humanitarianforumindonesia.org/PedomanAkuntabilitas/PrinsipPrinsipAkuntabilitas/1Independensi.aspx> diakses pada 05 September 2013

berdasarkan posisi daya tawar masing-masing aktor. Jika ada aktor yang mendominasi aktor lainnya maka akan tercipta pola ini disebut dependensi, Dalam hubungan antar aktor akan ada ketidak-seimbangan dalam segala hal, sehingga aktor yang memiliki kuasa lebih besar (baik dari sisi finansial maupun politik) akan mampu mengendalikan aktor lainnya dan pada akhirnya akan mendapat keuntungan yang lebih besar juga.

Jika kekuatan masing-masing aktor berimbang maka akan tercipta hubungan yang interdependensi, karena akan ada kerjasama yang saling menguntungkan, sedangkan jika hubungan antara NGO dengan donor dimana donor hanya sebagai pemberi bantuan dana tanpa ikut campur dalam NGO atau NGO tidak mau diintervensi terlalu jauh oleh donor maka NGO dikatakan independen.

Idealnya NGO sebagai salah satu bentuk dari *civil society* haruslah memiliki sebuah sifat dasar yang independen terhadap tekanan dari semua pihak yang dapat mengganggu kelancaran program-program yang akan dilaksanakan yang berpedoman pada visi dan misi NGO tersebut. Akan tetapi, dalam pelaksanaan program-program yang telah disusun sebuah NGO selalu memiliki donor sehingga independensi NGO menjadi hal yang harus dipertanyakan, Hal ini semakin terlihat ketika banyaknya negara-negara maju membentuk lembaga-lembaga donor bagi NGO-NGO di negara berkembang.

KKI Warsi dengan tegas mengatakan bahwasanya mereka merupakan NGO yang independen dari pengaruh donor, hal ini disebabkan karena mereka sangat

selektif dalam pemilihan donor, baik di tingkat domestik maupun global.<sup>15</sup> Kemudian para aktifis NGO lokal beranggapan bahwasanya NGO yang bergerak di bidang advokasi masyarakat merupakan NGO yang independen karena jika tidak maka hal itu akan merusak ideologi NGO itu sendiri.<sup>16</sup>

## **I.2 Rumusan Masalah**

Secara harfiah independensi diartikan sebagai hubungan kerjasama antar aktor yang dilaksanakan tanpa mengganggu prinsip-prinsip otonomi. Jadi dalam pola hubungan ini semua aktor yang terlibat dalam kerjasama bebas dari pengaruh dan kepentingan-kepentingan aktor lainnya.<sup>17</sup> Sebuah NGO bisa dikatakan independen jika mampu bergerak bebas tanpa adanya intervensi dari pihak di luar NGO itu sendiri. Dalam pola hubungan NGO dengan donor, hal yang paling sering diperdebatkan adalah dominasi dari donor terhadap NGO terutama dalam hal penentuan arah NGO. Hal ini disebabkan tingkat ketergantungan yang tinggi dari NGO lokal khususnya pada aliran dana dari donor internasional, sehingga NGO lokal tidak mampu berbuat banyak ketika donor internasional berusaha mendikte kinerja NGO lokal. Dalam prakteknya, memang sangat sulit bagi sebuah NGO yang masih bergantung pada aliran dana donor untuk bisa mempertahankan prinsip independensi-nya. Nyatanya hal demikian ini juga dipertanyakan oleh publik atas KKI Warsi sebagai sebuah NGO lokal yang selalu berusaha mempertahankan independensi-nya

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Nofri selaku staff KKI Warsi di Solok Selatan pada september 2012

<sup>16</sup> Wawancara dengan Dedi Triadi aktifis LSM IDEP, di Universitas Andalas pada April 2013.

<sup>17</sup> Humanitarian Forum Indonesia. Independensi.

<http://accountability.humanitarianforumindonesia.org/PedomanAkuntabilitas/PrinsipPrinsipAkuntabilitas/1Independensi.aspx> diakses pada 05 September 2013

terhadap donor internasional maupun lokal (pemerintah), sehingga independensi KKI Warsi masih belum terungkap sepenuhnya.

### **I.3 Pertanyaan Penelitian**

Mengacu kepada permasalahan diatas maka pertanyaan yang hendak dijawab melalui penelitian adalah bagaimanakah bangun independensi KKI Warsi dilihat dari hubungannya dengan IUCN sebagai donor?

### **I.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah mendiskripsikan dan menjelaskan independensi KKI Warsi dalam hubungannya dengan IUCN sebagai donor asing.

### **I.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini penulis klasifikasikan dalam tiga kelas yaitu:

1. Manfaat pribadi, yaitu untuk membentuk pemahaman yang lebih baik tentang independensi NGO.
2. Manfaat secara akademis, yaitu mendiskripsikan hubungan serta memperkaya konsep independensi dari sisi hubungan KKI Warsi dengan IUCN sebagai donor.
3. Manfaat secara praktis, bisa menjadi acuan bagi *domestic* NGO dalam mengambil kebijakan ketika berhubungan dengan donor.



## I.6 Studi Pustaka

Dalam dua dasawarsa terakhir NGO telah menjadi salah satu fokus kajian dalam ilmu sosial dan politik baik di tingkat nasional maupun internasional, sehingga karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan NGO/LSM/Ornop baik secara cetak maupun online mudah menemukannya. Husain Assa`di, Hadi Dharmawan, dan Soeryo Adiwibowo dalam artikel mereka berjudul “*Independensi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Di Tengah Kepentingan Donor*”<sup>18</sup> mengatakan bahwasanya dalam perspektif pembangunan LSM tidak hanya menjadi organisasi gerakan sosial (*social movement*) dalam mewujudkan kesuksesan pendekatan bawah ke atas (*bottom up*) saja, karena *platform* awal berdirinya sebuah LSM adalah sebagai lembaga independen dari kepentingan asing dan memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam bidang kesehatan, perekonomian, pelestarian lingkungan, budaya, dan banyak hal lainnya yang berhubungan dengan masyarakat itu sendiri.

Pada Awal tulisannya, Husain Assa`di dkk membahas hubungan NGO dengan pembangunan, hubungan NGO dengan negara, hubungan NGO dan donor, dan beberapa hal yang terkait untuk menjelaskan independensi NGO terhadap kepentingan donor. Inti dari tulisannya adalah mengupas kepentingan donor terhadap 2 LSM, yaitu Lembaga Kajian untuk Transformasi Sosial (LKTS) dan Lembaga Pertanian Sehat (LPS), dimana didalam tulisan itu dipaparkan bahwasanya LKTS yang menerima bantuan dana dari donor asing (*foreign funding*) dan donor di tingkat

---

<sup>18</sup> Husain Assa`di.et.al. Independensi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Di Tengah Kepentingan Donor. Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia, Agustus 2009, Vol 03. hlm.231-258

nasional lebih mudah dipengaruhi bahkan dijadikan alat untuk mencapai kepentingan “Si donor” dalam negara tersebut. Sedangkan LPS yang mengandalkan dana dari masyarakat dan tidak mau berkompromi dengan dana asing tersebut kegiatannya lebih terfokus sehingga mudah bergerak dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat karena tidak diintervensi oleh donor.

Singkatnya dalam tulisan ini menyatakan bahwasanya pergeseran kepentingan donor juga akan mempengaruhi fokus kegiatan LSM. Selain dari kepentingan donor, independensi LSM juga dipengaruhi oleh faktor internal yang mampu menjadi variabel penting dalam *bargaining position* sebuah LSM terhadap kepentingan donor. yaitu:

#### I. Militansi ideologi LSM

LSM yang memiliki visi dan misi yang jelas serta lebih berfokus pada pemberdayaan masyarakat dari pada keuntungan pribadi maupun kelompok, maka akan sulit untuk disusupi oleh kepentingan asing.

#### II. Kemapanan LSM dalam pendanaan

Pendanaan menjadi hal yang sangat fundamental dalam sebuah LSM, hal ini disebabkan karena LSM merupakan lembaga *non-profit oriented*, sehingga LSM bukan merupakan organisasi yang bertujuan menumpuk modal, akan tetapi memberdayakan dana yang ada secara maksimal untuk melaksanakan program. Dan disinilah dibutuhkan kreatifitas NGO dalam *fundraising strategy*, akan tetapi dalam teknik ini LSM juga harus memperhatikan donor, karena tidak sedikit LSM yang

terjebak dalam kepentingan donor sehingga menjadi alat bagi *funding driven* dalam tujuan tertentu.

### III. Kemapanan kinerja LSM

LSM yang telah bekerja secara jelas serta memuaskan maka cenderung akan mendapat kepercayaan dari masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan programnya akan mendapat *support* dan kerjasama yang penuh dari masyarakat baik dari segi dana (yang bersumber dari sumbangan masyarakat) ataupun tenaga untuk memperlancar program sehingga jika mampu demikian maka NGO akan bisa independen.

Walaupun dalam tulisan ini hanya mencantumkan 2 contoh NGO dalam hubungannya dengan donor-nya, namun cukup dapat membantu peneliti dalam memahami sifat dari independensi NGO lokal di Indonesia terhadap donor asing.

Selanjutnya peneliti merujuk pada buku karya Shamima Ahmed dan David Potter yang berjudul *NGO In International Politics*.<sup>19</sup> Dalam buku itu Shamima Ahmed dan David Potter mengatakan bahwa NGO merupakan “*new trends in international politics*”. NGO hadir dari pandangan liberalism yang menginginkan adanya kontrol terhadap kekuasaan negara yang absolut. Sebagai *public sphere* yang hadir sekitar tiga puluh tahun terakhir dimana kemunculan NGO berawal dari pertumbuhan *global civil society*, inovasi teknologi, dan perkembangan faham demokrasi yang menyebabkan trend tersebut cepat berkembang dalam politik

---

<sup>19</sup> Shamima Ahmed and David Potter. *NGO in International Politics*. USA. Kumarian Press Inc. 2006

internasional yang diharapkan mampu member pengaruh pada actor dalm hubungan internasional lainnya. Dimana NGO bisa melakukan kebijakan advokasi terhadap pemerintah dan IGOs, pembentukan politik dan agenda social, edukasi publik, memonitor perjanjian internasional dan kebijakan negara dengan fokus kritikan pada permasalahan global, membingkai isu, dan kebijakan pemerintah.

Dalam hubungannya dengan negara, tidak jarang NGO cenderung akan menjadi pihak oposisi dalam hal kebijakan yang hanya bertujuan untuk member “*warning*” terhadap kebijakan yang dibuat. Akan tetapi, dalam melihat sebuah isu yang berskala internasional, NGO cenderung bekerjasama dengan negara terutama dalam hal penegakan HAM baik warga negara sendiri maupun warga negara lain. Sedangkan dalam hubungan INGOs-IGOs terjadi dalam hal advokasi dan pembangunan. Kerjasama tersebut terlihat pada *sharing* informasi, teknologi, dan bantuan dana. Akan tetapi pandangan antara NGOs dengan IGOs tidaklah selalu sama, tergantung perspektif yang digunakan, bahkan tidak jarang bertokabelakang.

Merujuk kepada tulisan Gregg M. Nakano yang berjudul “*NGO Funding*”<sup>20</sup>, yang meneliti NGO di Amerika Serikat, Dalam tulisan ini, Gregg lebih memfokuskan pada NGO di Amerika Serikat (*United State*) yang dalam tulisannya sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah baik yang berupa hibah, pinjaman, maupun persetujuan kerjasama. Dan disana Gregg melihat bahwasanya setiap kali adanya bantuan yang datang dari pemerintah, selalu dilatarbelakangi oleh kepentingan pemerintah akan sebuah isu baik nasional maupun internasional. USAID yang

---

<sup>20</sup> Gregg.M.Nakano, *NGO Funding.Jurnal Guide to NGOs for Military*, Chapter6.hlm. 52-74

menjadi lembaga donor resmi dan terbesar di Amerika Serikat, yang secara langsung berada dalam “dekapan” pemerintah Amerika Serikat akan selalu memberikan bantuan dana bagi NGO yang dianggap memiliki program yang sejalan dengan program pemerintah. Karena bantuan pembangunan didasarkan pada dukungan dari tujuan kebijakan pemerintah Amerika Serikat, dana dialokasikan untuk proyek-proyek tertentu dengan men-dikte dimana, kapan, dan bagaimana, maka dengan demikian akan ada perluasan menerima bantuan di lapangan. Tindakan ini akan mengubah bantuan NGO dari kemanusiaan, karena pemerintah akan memberikan bantuan berdasarkan kebutuhan, dimana bantuan akan diberikan dalam pertukaran untuk kesetiaan politik atau informasi militer. Tapi mungkin lebih berbahaya bagi NGO adalah hilangnya netralitas dimata para aktivis NGO.<sup>21</sup> Sehingga dalam kondisi seperti ini terlihat bahwasanya jika sebuah NGO bergantung pada bantuan dana dari pemerintah-dalam hal ini dicontohkan di Amerika Serikat-maka NGO akan sulit untuk berkembang dan menjalankan tugas mereka sebagai mestinya karena selalu dibayang-bayangi oleh kepentingan nasional (*national interest*) yang sangat mencerminkan kepentingan para elit bukan kepentingan rakyat. Sebagai contohnya, NGO yang sangat bergantung pada dana dari negara (Amerika Serikat) tidak mampu berbuat pada isu kemiskinan di Ethiopia, krisis nuklir di India, perang sipil di Afrika, dan isu-isu internasional lainnya karena pemerintah tidak memiliki program dalam isu tersebut.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Gregg.M.Nakano, *NGO Funding.Jurnal Guide to NGOs for Military*. hlm61

<sup>22</sup> Ibid. hlm63

Dalam tulisan yang sama juga dijelaskan ada tiga sumber dana lain yang bisa diperoleh oleh NGO yaitunya dari perusahaan (*corporation*), lembaga dana (*foundations*) dan perorangan (*individual*). Sehingga NGO memiliki alternatif lain jika tetap mau mempertahankan tujuan mereka<sup>23</sup>. Dalam tulisan itu dijelaskan bahwasanya telah banyak terjadi bantuan baik dari perusahaan, lembaga dana, maupun perorangan yang ada di dunia saat ini. Sebagai contohnya adalah adanya konser musik yang dilakukan oleh artis papan atas dunia dalam rangka penggalangan dana untuk NGO yang fokus pada isu-isu kemanusiaan, Sejak tahun 1988 telah banyak contohnya, seperti: Bono, yang berpartisipasi dalam Band Aid, kemudian menjadi suara utama untuk pengembangan bantuan dan penanggulangan bencana. Lebih dari sebelumnya, individu dengan kekuatan bintang, seperti Angelina Jolie, Lucy Liu, Brad Pitt, Nicole Kidman, Mia Farrow, George Clooney, Don Cheadle, Matt Damon, dan Drew Barrymore<sup>24</sup>, menawarkan iklan beragam bentuk sumbangan untuk meningkatkan kesadaran kemanusiaan.

Memahami kondisi NGO di Indonesia atau yang lebih sering dikenal dengan LSM, maka penulis merujuk pada sebuah buku karangan Mansour Fakih, yang berjudul “*Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*”<sup>25</sup>. Dalam buku itu Fakih menjelaskan mulai dari arkeologi pembangunan

---

<sup>23</sup> Karena ada sebagian NGO yang hadir bersifat musiman atau bahkan dadakan, hadir hanya karena ingin mendapatkan dana dari berbagai pihak yang sedang mencari NGO untuk melaksanakan program-program tertentu. Setelah menerima dana, mereka akan bekerja-dan tidak jarang yang tidak efektif-dan ketika tidak ada bantuan mereka akan terkesan tidak ada bahkan mati.

<sup>24</sup> Gregg. *NGO Funding. Jurnal Guide to NGOs for Military*. hlm65

<sup>25</sup> Mansour Fakih. *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideology LSM Indonesia*, Yogyakarta, INSISTpress.2010

(developmentalism) di dunia serta permasalahannya yang kemudian memaparkan kehadiran NGO di dunia dan sampailah ke Indonesia. Dalam bukunya, Fakih juga menjelaskan sejarah NGO di Indonesia yang di Indonesia lebih dikenal dengan nama LSM-walaupun sebenarnya antara LSM dan NGO memiliki arti yang berbeda-yang bertujuan sebagai transformasi sosial dengan mengemukakan teori-teori perubahan sosial. Di sana Fakih melihat adanya hegemoni negara terhadap LSM di Indonesia karena adanya kerjasama dengan lembaga dana internasional dalam rangka melancarkan operasional kegiatan.

Fakih melihat adanya indikasi hegemoni dari lembaga dana baik yang berkaitan langsung dengan negara, seperti *Canadian International Development Agency* (CIDA) dari Kanada, USAID dari Amerika Serikat, *The German Organisation for Technical Cooperation* (GTZ) dari Jerman, maupun lembaga dana milik pemerintah lainnya, dan lembaga dana yang non-pemerintah seperti CRS, USC Kanada, IUCN, CUSO, CARE, Save the Children, FADO, HIVOS, OXFAM, dan lembaga dana non-pemerintah lainnya yang memainkan peranan besar dalam menentukan visi, misi, maupun program LSM di Indonesia. Harapan adanya kerjasama saling menguntungkan antara LSM dan lembaga dana akan sangat sulit diwujudkan karena hubungan hubungan tersebut tidaklah setara, sehingga lembaga dana internasional dengan mudah bias menentukan arah LSM nasional maupun lokal di Indonesia.

Lembaga donor biasanya akan menuntut adanya efektifitas dan efisiensi yang diciptakan dengan birokrasi dalam LSM, yaitu LSM besar menjadi perantara

dengan NGO kecil di daerah-daerah di tingkat akar rumput (*grassroot*). Sehingga LSM kecil dipaksa mengadopsi isu dan agenda yang ditetapkan oleh LSM besar (nasional) yang telah dirancang sebelumnya oleh lembaga dana.

Dalam tulisan Eveline van Mil yang berjudul *NGO Strategies at The Interface With Public And Profit*<sup>26</sup> memaparkan 10 tipe NGO berdasarkan orientasinya ketika bekerjasama dengan negara dan perusahaan. Dalam tulisannya ini dan Eveline van Mil menganggap hubungan negara dengan *civil society* baik yang berbentuk gerakan sosial maupun NGO merupakan masalah klasik, dan pengaruh perusahaan yang berorientasi *profit* terhadap NGO pada saat sekarang lebih besar dari pada pengaruh negara. Dalam menjalankan programnya, *campagne* NGO hampir selalu mengarah pada protes, debat, dan polarisasi terhadap kebijakan perusahaan yang memiliki dampak terhadap masyarakat dengan fokus pada satu masalah secara eksklusif sehingga bisa mendalami masalah tersebut. Namun NGO hanya bisa melakukan itu jika NGO berpegang pada prinsip independensi, karena jika mereka bersifat pragmatis maka intensitas hubungan akan meningkat dan inilah yang nantinya akan menjadi cikal bakal ketergantungan terhadap perusahaan (dana). Tulisan Eveline van Mil ini memperlihatkan hubungan antara NGO-perusahaan yang didasarkan pada sikap pragmatis dari mayoritas aktifis NGO demi menunjukkan eksistensi mereka.

---

<sup>26</sup> Eveline Van Mil. *NGO strategies at the interface with public and profit* <http://www.ib-sm.org/NGO%20strategies.pdf> diakses pada jumat 17 agustus 2013



## **I.7 Kerangka Konseptual**

### **1.7.1 *Civil Society***

Untuk memahami NGO kita tidak bisa terlepas dari *civil society* karena NGO merupakan salah satu bentuk *civil society* selain gerakan sosial (*social movement*) dimana kedua-duanya terbentuk dari reaksi masyarakat yang sadar dan mampu untuk memperjuangkan hak-hak sipil yang seharusnya mereka dapatkan tapi dikaburkan bahkan ditiadakan oleh negara.

Pemahaman *civil society* dimulai dari sebelum abad ke-18 pada zamannya Aristoteles ke Manfred Riedel, Cicero, dan yang terakhir JJ. Rousseau yang memberi pengertian yang sama antara *civil society* dengan negara (*state*). Kemudian pada paruh kedua abad ke-18 terjadi pergeseran makna serta definisi dari *civil society* itu sendiri yang dipelopori oleh filsuf pencerahan dari Skotlandia yang dimotori oleh Adam Ferguson, dan beberapa pemikir Eropa seperti Johann Forster, Tom Hodgins, Emmanuel Sieyes, dan Tom Paine. Mereka telah memisahkan antara negara dengan *civil society*, karena keduanya merupakan dua buah entitas yang berbeda. Sejalan dengan proses pembentukan sosial (*social formation*) dan perubahan-perubahan struktur politik di Eropa akibat pencerahan (*enlightenment*) dan modernisasi dalam menghadapi persoalan duniawi, yang keduanya turut mendorong tergusurnya rezim-rezim absolut.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Muhammad AS Hikam. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta, Pustaka LP3ES. 1996. hal.2

Kemudian pada masa era Marx dan Hegel yang memberikan pendapat tentang *civil society*<sup>28</sup> sehingga dalam konteks ini kita akan mengabaikan dimensi kemandirian yang menjadi inti dari *civil society*. Sehingga muncul kritik dari pemikir politik lainnya seperti Robert Mohl, J.S Mills, Anne de Stael, dan Alexis de Tocqueville. Dimana mereka inilah yang kemudian mengembalikan dimensi kemandirian dan pluralitas dalam *civil society*. Karena menurut Tocqueville<sup>29</sup>, dengan terwujudnya kemandirian, pluralitas, dan kapasitas daya tahan dalam *civil society*, maka warga negara akan mampu mengimbangi dan mengontrol kekuatan negara yang absolut.

Selain perdebatan diatas, kita harus menyadari bahwasanya dalam pemahaman *civil society* Antonio Gramsci juga memiliki peranan penting. Walaupun dia merupakan penganut marxisme, namun dia menolak determinasi ekonomi Marx, sehingga dalam konsep *civil society*-nya juga berbeda dengan pemikiran Marx maupun Hegel. Gramsci lebih memberi tekanan pada cendekiawan (*intellectual organic*) yang merupakan aktor utama dalam proses perubahan sosial dan politik.<sup>30</sup> Gramsci dengan demikian melihat adanya sifat kemandirian dan politis dari *civil society* walaupun pada instansi terakhir ia juga sangat dipengaruhi oleh basis material (ekonomi).

---

<sup>28</sup> Menurut mereka *civil society* justru memerlukan kontrol dari pemerintah dengan aturan, pembatasan, serta penyatuan dengan negara lewat kontrol hukum, administratif, dan politik. Hal ini disebabkan karena mereka menganggap bahwasanya dengan pemahaman *civil society* yang menekankan pada kemandirian dan perbedaan posisi seperti itu akan menjadi antitesis dari negara, yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah baru yang tak terelakkan dalam situasi politik dalam negara tersebut.

<sup>29</sup> Muhammad AS Hikam. Demokrasi dan Civil Society. hlm.3

<sup>30</sup>. Ibid

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan pengertian *civil society* menurut Alexis de Tocqueville, dimana Tocqueville mengatakan bahwa *civil society* itu adalah:

*”wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain: kesukarelaan (voluntary), keswasembadaan (self-generating), keswadayaan (self-supporting), dan kemandirian (independence) yang tinggi saat berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya”*.<sup>31</sup>

Tocqueville menjelaskan bagaimana *civil society* dapat menjalankan tugas tanpa intervensi negara. Disini Tocqueville memberikan perbedakan antara *political society* dan *civil society* terletak pada praktek mencari, mempertahankan, dan merebut kekuasaan. *Civil society* hanyalah entitas *pressure group*. Jadi NGO hanya berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah dengan tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat, bukan untuk merebut (kudeta) kekuasaan dari rezim yang tengah berkuasa.

NGO sebagai *pressure group* merupakan sebuah wadah untuk pencapaian hak-hak sipil maka NGO harus memiliki prinsip-prinsip yang terdapat dalam pengertian *civil society* menurut Tocqueville tersebut agar bisa menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Baik NGO yang berbentuk NGO lokal (*Domestic NGO/NGO*) maupun NGO internasional (*International NGO/INGO*).

---

<sup>31</sup> Muhammad AS Hikam. Demokrasi dan Civil Society. hlm.3

### 1.7.2 Tipologi NGO

Solidaritas (*solidarity*) dan jejaring (*networking*) merupakan hal yang sangat penting bagi NGO. Hal itu dikarenakan solidaritas dan jejaring merupakan hal yang harus dimiliki dan dikembangkan oleh NGO. Tanpa adanya solidaritas dan jejaring yang baik maka NGO tidak akan dapat melakukan segala aktifitasnya dengan baik karena NGO merupakan organisasi yang memperjuangkan berbagai macam isu *low politics* yang melewati lintas batas negara.<sup>32</sup>

Dalam usaha mencapai tujuannya, NGO harus dapat menjalin hubungan dengan banyak pihak seperti masyarakat, pemerintah, perusahaan, serta NGO lainnya baik di tingkat lokal maupun internasional.

NGO menjalin kerjasama dengan negara dimana ia beroperasi mengingat pemerintah merupakan aktor yang memiliki otoritas paling besar dalam negara untuk dalam konteks legalitas NGO tersebut. NGO memiliki nilai-nilai yang diusung dalam pergerakannya, berbeda dengan negara yang memiliki goal ke arah *political power* atau pelaku bisnis yang berorientasi pada *profit*, NGO memiliki *goal* ke arah penyebaran nilai-nilai yang diusungnya serta bagaimana menyuarakan aspirasi masyarakat yang termarginalkan dalam setiap isu dan kebijakan.

Kerjasama NGO lokal dengan pemerintah diharapkan mampu mengatasi permasalahan fundamental dalam masyarakat. Pemerintah membutuhkan NGO

---

<sup>32</sup> Martin Griffiths dan Terry O'Callaghan, *International Relations: The Key Concept*, London: Routledge, 2002, hal. 122.

karena NGO dianggap mampu menjangkau wilayah yang luput dari pengamatan pemerintah karena NGO bekerja di kalangan akar rumput serta NGO bisa menjalankan program-program ketika masyarakat tidak percaya akan pemerintah bahkan anti terhadap program-program pemerintah, sehingga NGO yang memiliki kedekatan dengan masyarakat mampu melakukan pendekatan kemudian menjalankan program tersebut. Di sisi NGO selain sebagai cara untuk menghindari tuduhan sebagai perpanjangan tangan pihak asing, NGO juga bisa menjadikan kerjasama itu sebagai salah satu strategi *fundraising*.

Akan tetapi pada prakteknya seringkali kerjasama itu NGO hanya menjadi perpanjangan tangan pemerintah. Pemerintah mampu menekan NGO karena NGO telah menerima bantuan dana dari pemerintah yang berasal dari APBN, bahkan di negara berkembang ada aturan yang berbentuk Undang-Undang (UU) yang sangat membatasi pergerakan NGO sehingga ini menjadi bentuk ancaman dari pemerintah terkait kelangsungan NGO di negara tersebut seperti yang terjadi di Indonesia. UU organisasi kemasyarakatan yang dikeluarkan tahun 1985 sangat memukul otonomi LSM. Karena dengan UU ormas ini memungkinkan pemerintah untuk menindak keras organisasi-organisasi yang aktifitasnya dinilai mengancam stabilitas dan aktifitas nasional.<sup>33</sup> Sehingga ketika negara tidak mampu menjalankan program, maka NGO-lah yang menjadi pelaksananya agar program yang mereka rancang tetap berjalan meski atas nama NGO, tapi tetap saja demi kepentingan pemerintah.

---

<sup>33</sup> **Lsm Dan Negara. Thefirstthink.** <http://thefirstthink.wordpress.com/2013/03/11/lsm-dan-negara-2/> diakses pada 05 September 2013.

Kemudian NGO lebih bisa dikontrol oleh pemerintah karena pada akhirnya NGO tidak mampu bersikap kritis terhadap program pemerintah karena tergantung pada dana yang disalurkan pemerintah serta UU. Dari sanalah kemudian terlihat hubungan kerjasama antara NGO dan pemerintah hanyalah interdependensi yang bersifat semu karena NGO tidak ada hubungan yang saling menguntungkan karena tetap saja NGO didominasi dan diintervensi oleh negara.

Selain itu, NGO juga akan berhubungan dengan perusahaan-perusahaan (*corporate*) yang umumnya dengan korporasi baik di tingkat nasional maupun internasional. *Multinational Corporation* (MNC) yang umumnya mendapatkan keuntungan lebih besar jika beroperasi di Negara Dunia Ketiga sering mendapat tekanan dari NGO karena adanya praktek pelanggaran hak buruh, pencemaran lingkungan, dan masalah sosial lainnya saat proses produksi. NGO akan beraksi ketika melihat ada ketidakberesan dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Akan tetapi posisi pemilik MNC yang lebih kuat karena memiliki modal besar untuk mempengaruhi elit negara serta media massa guna memberikan kesan bahwa NGO adalah pembuat masalah.

Kerjasama antara NGO dengan korporasi terwujud ketika NGO ikut serta dalam mengawasi kegiatan MNC, baik dari sisi produksi, perburuhan, kelestarian lingkungan, ekonomi, sosial, dan lainnya. Maka dari itu korporasi tersebut akan merangkul NGO untuk bekerjasama dalam memperbaiki bahkan mengatasi permasalahan tersebut. Mungkin awalnya kerjasama tersebut berjalan lancar, permasalahan muncul ketika korporasi melihat NGO telah sangat tergantung pada

mereka dari sisi pendanaan maka korporat tersebut akan mulai memberi tekanan pada NGO. Hingga akhirnya korporat tersebut menjadikan NGO sebagai alat agar mereka mampu diterima oleh masyarakat serta semua kegiatan mereka lebih leluasa mengeksplotasi sumber daya alam maupun buruh tanpa ada lagi yang menentang.<sup>34</sup>

Dalam tulisan Eveline van Mil yang berjudul *NGO Strategies at The Interface With Public And Profit* memaparkan 10 tipe NGO berdasarkan orientasinya ketika bekerjasama dengan negara dan perusahaan, yaitunya<sup>35</sup>.

1. BONGOs (*Business Oriented NGOs*),

Sesuai dengan jenisnya yang berorientasi bisnis, NGO tipe ini bertujuan agar masyarakat lebih mandiri dari sisi ekonomi, cara yang ditempuh adalah dengan menciptakan peluang usaha yang nantinya mampu menopang perekonomian masyarakat.

2. PONGOs (*Partnership Oriented NGOs*),

Tipe ini berfokus pada membangun kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka mencapai tujuan bersama yang nantinya mampu menciptakan masyarakat yang memiliki banyak jaringan untuk bekerjasama.

---

<sup>34</sup> Dewan Pimpinan Pusat LSM. NGO-LSM: Kupas tuntas non-profit oriented. <http://ismkupastumpas.blogspot.com/2011/06/ism-npo-dan-hubungan-bisnis-perdagangan.html> diakses pada jumat 17 agustus 2013

<sup>35</sup> Eveline Van Mil. *NGO Strategies At The Interface With Public And Profit* - <http://www.ib-sm.org/NGO%20strategies.pdf> diakses pada jumat 17 agustus 2013

3. BINGOs (*Business Interest NGOs*),

Hampir sama dengan BONGOs, bedanya adalah jika BINGOs menginginkan usaha yang tercipta lebih besar dengan pemasaran yang luas, dengan harapan yang sama dengan BONGOs.

4. SHANGOs (*Shareholding NGOs*),

Lebih jauh dari BONGOs dan BINGOs adalah SHANGOs yang berusaha mengembangkan kemampuan masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam bentuk saham dalam sebuah perusahaan, harapannya agar masyarakat setidaknya mampu ikut mengambil bagian dalam pengambilan kebijakan dalam sebuah perusahaan bahkan lebih dari itu bisa ikut merasakan keuntungan perusahaan.

5. STRONGOs (*Strategic Stakeholder Oriented NGOs*),

Ketika ada permasalahan yang terlihat maka NGO tipe ini akan cepat berkoordinasi dengan pemerintah untuk memperoleh solusi yang tepat. NGO tipe ini juga akan menganalisis permasalahan yang terjadi kemudian melakukan serangkaian upaya mengatasi permasalahan tersebut dengan bekerjasama dengan pemerintah.

6. BRONGOs (*Broker Oriented NGOs*),

Kerjasama antara pemerintah (negara) dengan NGO terjadi pada NGO dengan tipe ini. NGO menjadi perantara antara masyarakat dengan pemerintah, dimana NGO menyampaikan aspirasi serta keluhan masyarakat kepada elit negara bersangkutan. NGO ini hanya menjadi wadah perantara saja, tanpa ada aksi lebih lanjut.



7. *SUNGOs (Supervisory NGOs),*

Pengawasan yang dilakukan oleh NGO disini dilakukan terhadap semua pihak, baik pemerintah, perusahaan, maupun rakyat, tujuannya agar tercipta hubungan yang selaras diantara ketiga pihak tersebut tanpa adanya pihak yang dirugikan.

8. *DONGOs (Discussion and Dialogue Oriented NGOs),*

Dalam prakteknya NGO tipe ini lebih mengutamakan diskusi dan dialog dalam mencari solusi terhadap permasalahan yang sedang terjadi. Diskusi tersebut melibatkan semua unsur terkait isu tersebut, sehingga dalam proses penyelesaian masalah tersebut mendapat dukungan banyak pihak dan diharapkan mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan bersama.

9. *WONGOs (Watchdog Oriented NGOs),*

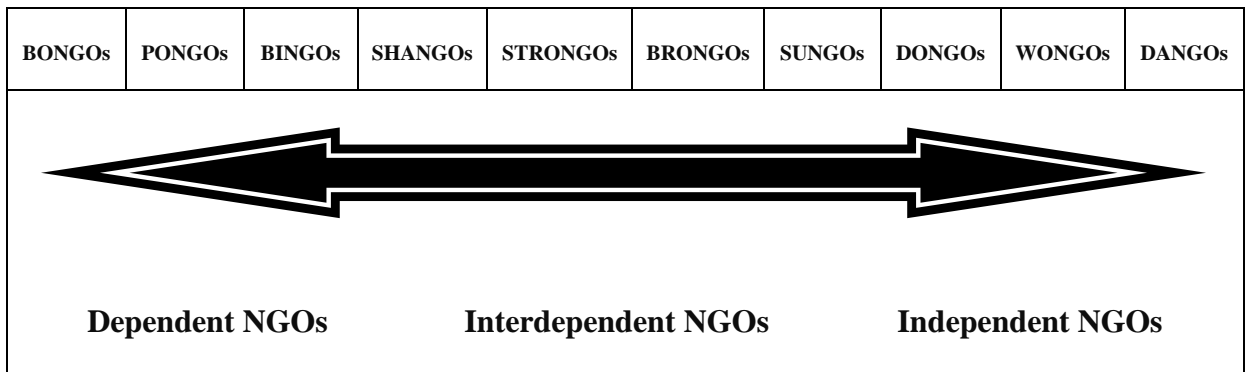
NGO tipe ini sangat sensitif dengan pelanggaran serta kelemahan pemerintah negara maupun korporasi. Apabila terjadi ketidakberesan dalam negara baik yang disebabkan oleh para elit ataupun perusahaan maka NGO ini akan cepat bergerak. Dimana gerakan ini dengan tujuan agar hak-hak masyarakat tidak terabaikan.

10. *DANGOs (Direct Action Oriented NGOs)*

Dari semua tipe NGO sebelumnya, tipe ini adalah tipe yang paling agresif. NGO tipe ini akan melakukan kegiatan/program langsung turun ke masyarakat baik disetujui atau tidak oleh masyarakat. Karena tipe ini beranggapan bahwasanya

kondisi tidak memungkinkan lagi untuk menunggu ataupun bekerjasama dengan pihak lain (pemerintah dan perusahaan) dalam mengatasi permasalahan yang ada. Bahkan tipe ini tidak jarang akan melakukan aksi-aksi yang anarkis untuk baik hanya sekedar menarik perhatian maupun untuk merubah keadaan.

Dan jika dilihat dari sisi independensi-nya kesepuluh NGO tersebut bisa dibagi kedalam sebuah skema seperti berikut:<sup>36</sup>



Akan tetapi, yang harus diingat bahwasanya NGO dengan mudah bermutasi dari satu tipe ke tipe lainnya apabila tidak memiliki ideologi yang jelas dan kuat. Dalam sistem internasional, pada saat ini NGO telah memiliki posisi yang cukup strategis untuk mampu membawa isu-isu fundamental dalam kehidupan masyarakat ke dalam pertemuan internasional. NGO melakukan lobi agar para pemimpin negara-negara di dunia melihat permasalahan fundamental yang bersentuhan langsung dengan masyarakat baik secara umum maupun lebih spesifik pada negara tertentu yang membutuhkan perhatian bersama.

<sup>36</sup> Eveline van Mil. *NGO Strategies at The Interface With Public And Profit* hal 3

Selain kerjasama di atas, NGO lokal menjalin hubungan dengan NGO Internasional atau yang lebih dikenal *International Non-Government Organization* (INGO). Tidak sedikit NGO lokal di Indonesia yang bekerjasama dengan INGO, bahkan INGO itu menjadi donor bagi NGO lokal. NGO tidak akan mampu berjalan sendiri, NGO membutuhkan mitra, semakin kuat dan tepat mitranya maka akan semakin mudah mencapai tujuannya. Salah satu mitra yang tepat adalah INGO karena INGO memiliki akses lebih luas daripada NGO. Dalam posisinya-pun INGO juga lebih mapan dari pada NGO baik segi popularitas, kinerja, maupun finansial. Dan yang menarik adalah mayoritas kerjasama antara NGO dengan INGO lebih ditekankan pada program dan pendanaan. INGO akan bekerjasama dengan NGO yang memiliki arah program yang sama sehingga dalam prakteknya akan ada aliran dana dari INGO ke NGO dengan jumlah yang tidak sedikit.

Akan tetapi dibalik bantuan dana yang diberikan oleh INGO terhadap NGO lokal memunculkan kecurigaan. Hal ini disebabkan karena ada anggapan bahwa INGO tersebut juga menjadi perpanjangan tangan dari perusahaan ataupun asing, sehingga kedepannya program yang dibangun oleh INGO ketika bekerjasama dengan NGO lokal juga akan memaksa NGO lokal mengadopsi nilai-nilai serta kepentingan yang dibawa oleh INGO.

Jika kerjasama NGO dengan donor-nya tidak dilakukan dengan hati-hati maka demokrasi yang selalu didengung-dengungkan oleh semua NGO baik lokal maupun internasional tak lebih dari sebuah jargon untuk menutupi ketidakmampuan mereka untuk melepaskan diri dari dominasi dan intervensi donor. Jangankan untuk menemukan

sebuah NGO yang independen, hubungan yang interdependensi-pun juga tidak akan pernah ada dalam dunia NGO karena tingkat ketergantungan NGO terhadap donor semakin meningkat.

### 1.7.3 Independensi NGO

Dari sekian banyak *international funding* bagi NGO yang memiliki sifat pembangunan seperti USAID, CIDA, dan Bank Dunia yang menjadi donor bagi NGO lokal di Indonesia menimbulkan pertanyaan terkait independensi NGO itu sendiri. Kemudian seberapa kuatkah ketergantungan mereka terhadap paradigmanya donor yang ada di Indonesia yang kebanyakan mendukung ideologi modernisasi.<sup>37</sup> Lembaga tersebut akan menjadi hambatan bagi NGO di Indonesia untuk mengimplementasikan paradigma dan konsep pembangunannya karena posisi donor yang kuat dan sangat berpengaruh. Menghadapi dilema kebutuhan menciptakan paradigma transformatif sosial, alternatif sementara mereka masih bergantung pada donor baik berupa lembaga dana (*funding agency*) ataupun NGO dari utara, maka NGO harus menjelaskan konsep pembangunannya dan posisi mereka agar tidak menimbulkan mosi tidak percaya bahkan antipati masyarakat terhadap kehadiran mereka.

Idealnya peran donor asing tidak negatif, posisi NGO yang membutuhkan pendanaan untuk melaksanakan program yang memang bersangkutan dengan donor justru memaksimalkan program yang dilaksanakan. Donor asing memang sudah lama masuk negara berkembang untuk menjembatani masyarakat dan mengawal jalannya

---

<sup>37</sup> Mansour Fakih. Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia hal.100

pemerintahan. Sementara di pihak donor sendiri, pemberian dana kepada NGO lokal di negara selatan bertujuan untuk mempercepat proses demokratisasi di negara tersebut. Di sinilah kemudian muncul saling ketergantungan (interdependensi) antara NGO dengan donornya karena mereka saling membutuhkan untuk mencapai kepentingan masing-masing, dimana NGO membutuhkan dana sedangkan donor membutuhkan NGO untuk melakukan percepatan demokratisasi ataupun program lainnya yang sejalan dengan mereka.

Akan tetapi, selama ini hubungan interdependensi antara NGO dengan donornya hanyalah hubungan interdependensi yang semu, karena posisi tawar (*bergaining position*) yang lebih besar mengakibatkan donor cenderung memaksakan NGO untuk bekerjasama dengan menggunakan perspektif donor terhadap sebuah isu, dan hal ini sama saja seperti konsep dependensi karena NGO tidak mampu bersifat kritis dalam melihat sebuah isu karena sangat dipengaruhi donor.

Independensi menjadi syarat mutlak bagi sebuah NGO agar mampu menjalankan fungsinya serta mencapai apa yang dicita-citakan demi kesejahteraan masyarakat baik di tingkat domestik maupun global.

Menurut Rob Wells, seorang pakar NGO dari Inggris, ada empat faktor utama untuk melihat independensi sebuah NGO yaitu :<sup>38</sup>

### **1. Program**

NGO harus memiliki program-program yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat, dan mampu menjadi pelayan masyarakat dengan arah yang jelas tanpa harus keuntungan terutama dalam hal finansial individu. Dimana program yang disusun NGO harus berdasarkan visi dan misi organisasi. Disini harus memperhatikan bagaimana proses perumusan program, pelaksanaan program, serta pertanggungjawaban program terhadap donor.

### **2. Persepsi**

Persepsi disini untuk melihat independensi NGO dari dalam, karena persepsi yang dimaksudkan adalah bagaimana cara pandang NGO terhadap sebuah isu yang ada, fenomena yang terjadi, serta kebijakan yang diambil pemerintah lokal, nasional, maupun internasional. Selanjutnya adalah cara NGO dalam mengelola isu tersebut sehingga menjadi hal penting dibahas oleh para elit di negara.

### **3. Popularitas**

Berbeda dengan persepsi, popularitas digunakan untuk melihat independensi NGO dari luar, mkasudnya adalah bagaimana respon masyarakat terhadap NGO.

---

<sup>38</sup> Rob Wells. *Development in Practice: Ensuring NGO Independence In The New Funding Environment* Volume 11. England. Routledge.2001

Popularitas disini maksudnya adalah bagaimana sebuah NGO membangun konstituen dukungan dari masyarakat, dimana dengan demikian maka NGO mampu memperoleh bantuan dalam melaksanakan programnya. Disini harus dilihat pandangan masyarakat terhadap NGO berdasarkan kinerja NGO serta manfaat kehadiran NGO bagi kehidupan masyarakat.

#### **4. Pendanaan**

Bagaimana NGO mampu untuk terlepas dari ketergantungan yang berlebihan terhadap donor, serta cara yang dilakukan NGO agar bisa dengan menciptakan sumber pendanaan lainnya diluar pendanaan dari donor sehingga NGO tidak tergantung pada satu sumber pendanaan.

Jika NGO melakukan 4 faktor diatas dengan keinginan sendiri, tanpa campur tangan pihak luar organisasi maka NGO bisa dikatakan independen, dan sebaliknya.

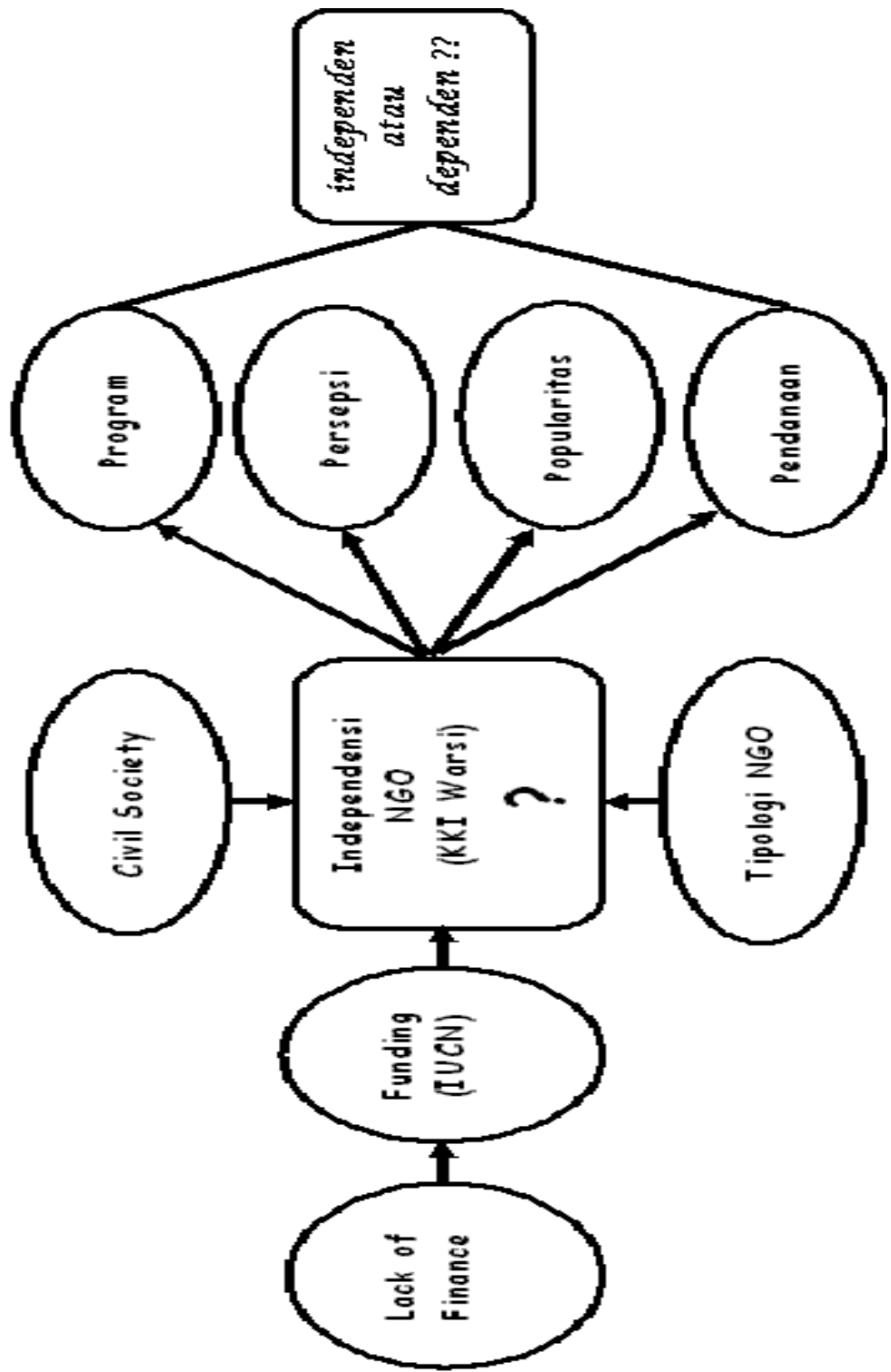
Penelitian yang dilakukan oleh Rob Wells tersebut dilakukan di Inggris yang memiliki kultur budaya dan politik yang berbeda dengan Indonesia. Dimana kondisi demokrasi memberikan dampak signifikan dalam perkembangan NGO dalam suatu negara. Bagi negara yang telah sukses menjalankan demokrasi maka NGO akan tumbuh dan berkembang bahkan menjadi *partnert* bagi pemerintah, sedangkan dinegara berkembang baik maka NGO sangatlah sulit berkembang. NGO di negara yang masih dalam proses demokratisasi maka NGO lebih sering ditekan pertumbuhannya, walaupun ada hanyalah sebagai perpanjangan tangan pemerintah

dalam mencapai tujuan pemerintah yang kadang jauh dari tujuan NGO itu sendiri bahkan bertolak-belakang.

Di negara berkembang, NGO sangat dibatasi oleh negara karena dianggap akan mengganggu pemerintah sehingga tidak sedikit para pemimpin NGO yang dipengaruhi atau bahkan dibunuh baik secara fisik maupun mental oleh pemerintah. Sehingga program-program yang telah disusun oleh NGO bersangkutan tidak berjalan. Selain dari itu dari segi finansial NGO juga masih bergantung pada dana yang diberikan oleh pemerintah sehingga hal ini akan semakin mempermudah pemerintah mengontrol NGO di negara tersebut.



## **1.8 Peta Pemikiran**



## **I.9 Metodologi Penelitian**

### **I.9.1 Batasan Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah pada elemen-elemen yang membentuk independensi pada KKI Warsi (Komunitas Konservasi Indonesia Warung konservasi) dikaitkan dengan kerjasama yang dibentuk dengan donor yaitu IUCN (*International Union Conservation of Nature*) yang berlangsung selama periode 2010-2013 di Solok Selatan. Jadi peneliti akan meneliti bagaimana kerjasama yang terjalin antara keduanya selama periode tersebut dilihat dari aspek independensi NGO.

### **I.9.2 Tingkat Analisis (*Level of Analysis*)**

Secara umum, tingkat analisa dibedakan atas 4 macam, yaitu individu, organisasi, kelompok atau komunitas (kelas, etnik, budaya, agama, ideologi dan sejenis itu), dan masyarakat dalam arti luas (negara, kawasan atau internasional).<sup>39</sup> Sedangkan dalam ilmu hubungan internasional tingkat analisa dibedakan kedalam 5 kategori, yaitu 1. Individu, 2. Kelompok, 3. Negara-bangsa, 4. Kelompok negara dalam satu *region*, dan 5. Sistem internasional atau global.<sup>40</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tingkat analisa (*level of analysis*) kelompok dengan KKI Warsi sebagai unit analisa dan IUCN sebagai unit ekplanasi. Asumsinya, walaupun perilaku organisasi bergantung pada aktor yang menjalankan

---

<sup>39</sup> Burhan Bungin, eds. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010. Hlm126

<sup>40</sup> Mohtar Mas' oed. *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES,1990. Hlm40

dan mengelola sistem internalnya akan tetapi tetap dalam berhubungan dengan pihak lain akan menggunakan nama KKI Warsi, bukan pimpinan KKI Warsi. Melihat kepada kondisi KKI Warsi yang menggunakan dana asing (IUCN) sedikit atau banyak bisa mendatangkan pengaruh kepada bentuk-bentuk dalam sistem internalnya. Namun jika sistem didalam sudah mapan, maka faktor ini tidak akan terlalu besar pengaruhnya kepada independensi organisasi.

### **I.9.3 Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, menggunakan metode kualitatif sebagai landasannya. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan mengeksplorasi dan klarifikasi mengenai sesuatu fenomena sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang saling bergantung dan mengandung kompleksitas.<sup>41</sup> Metode ini dianggap tepat karena yang ingin didapatkan dari penelitian ini adalah pengalaman dan pemahaman pada subjeknya (praxis).<sup>42</sup> Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk membangun dan mengembangkan perbendaharaan teori tentang NGO. melainkan untuk pengembangan konsep independensi pada NGO. Adapun tahap-tahap untuk mendapatkan data-data tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

### **I.9.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang akan penulis lakukan adalah dengan teknik wawancara dan studi dokumentasi berupa buku, bahan *online*, dan dokumen-dokumen terkait penelitian.

---

<sup>41</sup> Sanaprah Faisal.Format-format penelitian sosial, dasar-dasar dan aplikasi.Jakarta.Rajawali Persada.1995.hal20

<sup>42</sup> ibid

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara dengan menggunakan petunjuk umum. Pada tahap ini wawancara dilakukan dengan sebuah pedoman yang akan diajukan pada informan, Ini khususnya dilakukan untuk mendalami persoalan-persoalan yang ditemukan dalam wawancara bebas atau informal. Sekalipun dilakukan dalam situasi formal pertanyaan tidak harus berurutan. Tidak seperti halnya orang yang sedang melakukan survey, apa yang ditanyakan tergantung pada apa yang ingin didalami, yang ditemukan dalam pembicaraan informal, selanjutnya untuk mendalami dan menemukan rincian-rinciannya lebih bersifat dialogis.<sup>43</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara dengan menggunakan petunjuk umum dengan empat informan, yaitu staff KKI Warsi, yaitunya pemimpin (direktur) dan para pengambil kebijakan dalam KKI Warsi terutama dalam berhubungan dengan IUCN., masyarakat yang berada di wilayah dampingan KKI Warsi berkaitan dengan program kerjasama dengan IUCN di Kabupaten Solok Selatan, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang mengurus masalah kehutanan, dan NGO lokal maupun nasional yang pernah bekerjasama dengan KKI Warsi. Cara mendapatkan informan bisa langsung mendatangi lokasi dimana mereka beroperasi atau melalui komunikasi via email.

---

<sup>43</sup> Dr.Lexy J. Moleong M.A. Metodologi penelitian kualitatif, ed.Tjun Surjaman.. Bandung. PT.Remaja Rosdakarya. 2000. 135-138

### **I.9.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Pada tahap ini, penulis melakukan pengelompokan data dengan mengacu kepada unsur-unsurnya dan elemen-elemen yang akan dianalisa. Data-data tersebut adalah yang telah diseleksi validitasnya melalui intersubjektiviti, Data yang kurang relevan tidak dibuang, melainkan disimpan, untuk digunakan kembali, jika ternyata kemudian muncul keraguan terhadap hasil interpretasi, akibat muncul atau ditemukan kasus yang menggambarkan hal yang berbeda.<sup>44</sup>

Penyajian data kuantitatif juga dimungkinkan dalam laporan, namun bukan itu yang menjadi landasan pokok untuk analisa. Data kuantitatif hanya dipakai untuk memperlihatkan bukti fisik yang menopang pendapat peneliti.

Interpretasi peneliti lakukan dari sejak awal penelitian, hingga melakukan diskripsi dan analisa atas data-data. Interpretasi merupakan tahapan penting dimana pemahaman subjek mengalami perubahan menjadi pemahaman peneliti. Pada tahap ini penulis berusaha mempertahankan objektivitas dengan melakukan pengecekan secara lintas subjek, juga melihat kepada dokumen resmi, transkrip hasil wawancara, buku catatan, juga kasus-kasus konkrit yang muncul dilapangan, yang diberitakan oleh media massa, dan yang dipublikasikan melalui internet

Dalam melakukan analisis, peneliti menggunakan metode etik dan emik. Etik adalah struktural yang berarti peneliti berasumsi bahwa perilaku manusia terpola dalam system pola itu sendiri, sedangkan emik adalah usaha mengungkapkan dan

---

<sup>44</sup> Burhan Bungin. Analisis data penelitian kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. Jakarta: Rajawali Pers, 2008. Hlm75

mengurai pola suatu bahasa atau kebudayaan tertentu dari unsur-unsur bahasa atau kebudayaan itu berkaitan satu dengan lainnya dalam melakukan fungsi sesuai dengan pola tersebut.<sup>45</sup> Jadi peneliti akan mengumpulkan data (etik) kemudian menganalisa menurut pendapat peneliti (emik), dan menyimpulkannya (etik dan emik).

## **I.10 Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini terdiri dari lima (5) bab, dengan rancangan sebagai berikut:

*Bab I* merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

*Bab II* merupakan bab yang memaparkan tentang profil KKI Warsi dan IUCN yang mencakup sejarah berdirinya, visi dan misi, program, serta sejarah kerjasama antara KKI Warsi dengan IUCN.

*Bab III* merupakan bab memaparkan temuan data yang telah diperoleh oleh peneliti tentang bentuk-bentuk independensi KKI Warsi beserta ekspresi dari informan, rangkaian pada unsur-unsurnya, elemen-elemen yang saling berkaitan dan memberi arti terhadap independensi KKI Warsi.

Dalam *Bab IV* dimana dalam bab analisa temuan, dan hasil interpretatif peneliti yang dimunculkan guna menyuguhkan pengetahuan tentang luasnya dan kedalaman independensi KKI Warsi dalam hubungan kerjasama dengan IUCN.

Dan *Bab V* merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

---

<sup>45</sup> Dr.Lexy J. Moleong M.A. Metodologi penelitian kualitatif, ed.Tjun Surjaman.. Bandung. PT.Remaja Rosdakarya. 2000. Hal.53-54